JURNAL HUKUM ACARA PERDATA

ADHAPER

Vol. 4, No. 1, Januari – Juni 2018

- **Asas Integrasi dalam Undang-Undang Kepailitan Versus Cita-Cita Kodifikasi dan Unifikasi Hukum Acara Perdata**
Dewa Nyoman Rai Asmara Putra

ISSN. 2442-9090

ADHAPER

DAFTAR ISI

1. Penyelesaian Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama dalam Kaitannya dengan Kewenangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Devianty Fitri, Yussy A. Mannas.....	1–18
2. Penyelesaian Sengketa Perkawinan terhadap Harta Bersama Terkait Isteri Nusyuz (Durhaka) dan Akibat Hukumnya di Indonesia Syahrial Razak.....	19–33
3. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perkara Waris Sesuai Asas Keadilan Ning Adiasih.....	35–56
4. <i>Conflict of Norm</i> antara Pencabutan Hak dan Penitipan Ganti Kerugian di Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah untuk Pembangunan M. Hamidi Masykur, Harinanto Sugiono	57–72
5. Reklamasi Pulau K dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan dan Kekuatan Hukum Izinnya Untoro, Hamdan Azhar Siregar	73–90
6. Penerapan Asas Pembalikan Beban Pembuktian dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Misnar Syam	91–108
7. Upaya Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa di Lembaga Perbankan Suherman.....	109–122
8. Implementasi Gugatan Sederhana dalam Litigasi di Pasar Modal sebagai Upaya Perlindungan Konsumen (Investor) Pasar Modal Indonesia Ema Rahmawati	123–139
9. Sidang Pemeriksaan Setempat pada Peradilan Hubungan Industrial dalam Pelaksanaan Asas Peradilan Cepat Tepat Adil dan Murah Holyness Singadimeja, Sherly Ayuna Puteri.....	141–158
10. Asas Integrasi dalam Undang-Undang Kepailitan Versus Cita-Cita Kodifikasi dan Unifikasi Hukum Acara Perdata Dewa Nyoman Rai Asmara Putra.....	159–178

PENGANTAR REDAKSI

Para pembaca yang budiman, beberapa artikel yang dipresentasikan dalam Konferensi Hukum Acara Perdata di Universitas Tadulako, Palu pada tahun 2017 disajikan dalam edisi kali ini. Artikel-artikel tersebut memuat berbagai pokok pikiran mengenai proses penyelesaian sengketa di bidang keperdataan. Setidaknya terdapat lima area penyelesaian sengketa yang dibahas dalam artikel-artikel kali ini, yaitu penyelesaian sengketa perkawinan, waris, pertanahan, konsumen, hubungan industrial, dan satu artikel tentang pemikiran mengenai cita kodifikasi dan unifikasi hukum acara perdata.

Artikel pertama dibawakan oleh Rekan Devianty Fitri dan Yussy A. Mannas membahas tentang perijinan bagi suami untuk berpoligami yang merupakan kewenangan hakim pengadilan agama. Artikel berikutnya masih mengenai perkawinan disampaikan oleh Rekan Syahrial Razak yang menyoroti latar belakang permohonan talak atas dasar istri *nusyuz* (durhaka) serta akibat hukumnya. Artikel ketiga mengenai waris ditulis oleh Rekan Ning Adiasih yang membahas penemuan hukum oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa waris, baik di lingkungan peradilan umum maupun lingkungan peradilan agama dengan memperhatikan pluralism hukum yang berlaku di bidang hukum waris.

Sengketa mengenai tanah secara khusus ditulis oleh Rekan M. Hamidi Masykur yang membahas mengenai adanya pertentangan norma di dalam ketentuan mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Masih berkaitan dengan sengketa tanah, Rekan Untoro dan Hamdan Azhar Siregar menulis tentang proses pembentukan pertimbangan hukum hakim mengenai sengketa terkait perizinan reklamasi yang merupakan ranah peradilan tata usaha negara serta kaitannya dengan aspek keperdataan yang menjadi ranah peradilan umum.

Tiga artikel berikutnya berkaitan dengan sengketa konsumen, yang pertama ditulis oleh Rekan Misnar Syam yang mengulas penerapan prinsip pembalikan beban pembuktian dalam penyelesaian sengketa konsumen berkaitan dengan tanggung gugat mutlak pelaku usaha dan tanggung gugat produk. Rekan Suherman membahas tentang proses penyelesaian sengketa perbankan melalui mediasi yang saat ini cukup berkembang dan dipromosikan baik oleh BI maupun OJK. Rekan Ema Rahmawati menulis tentang pemanfaatan prosedur gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 untuk menyelesaikan sengketa di bidang pasar modal.

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dikemukakan oleh Rekan Holyness Singadimeja dan Sherly Ayuna Puteri yang menyoroti masalah pemeriksaan setempat yang

dilakukan oleh pengadilan hubungan industrial dikaitkan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Artikel terakhir berkaitan dengan upaya pembaharuan hukum acara perdata nasional khususnya pada prinsip kodifikasi dan unifikasi yang dalam hal ini ditulis oleh Rekan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra.

Kami berharap artikel-artikel yang dimuat kali ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum dalam kaitan teori dan praktik. Selamat membaca!

Salam,

Redaksi Jurnal Adhaper

ASAS INTEGRASI DALAM UNDANG-UNDANG KEPAILITAN VERSUS CITA-CITA KODIFIKASI DAN UNIFIKASI HUKUM ACARA PERDATA

Dewa Nyoman Rai Asmara Putra*

ABSTRAK

Hukum Acara Perdata memegang peranan penting untuk dapat dilaksanakannya hukum perdata materiil, sesuai pembagian hukum dari segi fungsinya bahwa hukum acara sebagai hukum formil berfungsi untuk menjamin ditaatinya hukum perdata materiil. Oleh karena demikian pentingnya fungsi hukum acara perdata, maka kodifikasi dan unifikasi hukum acara untuk menjamin kepastian hukum sangat perlu dan mendesak untuk dilakukan. Secara filosofis kodifikasi dan unifikasi hukum acara perdata merupakan cita-cita luhur dalam bidang pembentukan hukum nasional demi kepastian hukum untuk kepetingan para penegak hukum dan para pencari keadilan. Hukum acara perdata sampai saat ini masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik merupakan peninggalan jaman pemerintahan kolonial Belanda, maupun menyatu dalam hukum materiil dalam bentuk undang-undang. Kodifikasi dan unifikasi hukum acara perdata sudah sejak lama di idam-idamkan. Tidak kurang dari tahun 1967 telah tersusun RUU Hukum Acara Perdata, yang telah disahkan oleh sidang pleno BP-LPHN ke 13, yang diharapkan menjadi kitab undang-undang hukum acara perdata yang berlaku menyeluruh dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun sampai saat ini RUU dimaksud belum menjadi undang-undang. Disatu sisi ada cita-cita kodifikasi dan unifikasi hukum acara perdata, dan dilain pihak ada asas integrasi yang dianut oleh UU Kepailitan dan PKPU. Asas integrasi mengandung arti bahwa sistem hukum formil menjadi satu kesatuan dalam sistem hukum perdata materiil. Isu hukumnya, apakah asas integrasi sejalan dengan cita-cita kodifikasi dan unifikasi hukum acara perdata. Artikel ini disajikan atas hasil penelitian hukum normatif dengan menitikberatkan pada pendekatan perundang-undangan serta analisis konsep hukum.

Kata Kunci: asas integrasi, kepailitan, kodifikasi, unifikasi.

ABSTRACT

Civil procedure has important role in enforcing civil rights. Therefore codification and unification of civil procedure may guarantee the legal certainty which necessary and urgent in law enforcement. Philosophically, codification and unification is an idea in the development of national legal system. The regulation of civil procedure until nowadays is distributed into many parts of law and regulation, which mostly inherited from the Dutch Colonial Administration or substantive statutory laws enacted by the Indonesian legislative body and government. Since 1967, the bill of civil procedure had been

* Penulis adalah Dosen Pengajar Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

ratified in 13th plenary session of National Legal Reform Task Force (BPLPHN), which expected to be the new Indonesian civil procedure. However, until today, the bill is not ratified yet to be a law by the parliament. There is an idea of codification and unification of civil procedure, on the other side there is integration principle, which adopted in Law of Bankruptcy and Suspension of Payment. The integration principle means that all civil procedural laws should be into one system of civil law. The main issue is that whether integration principle align with the idea of codification and unification. This article will answer the issue as a result of doctrinal research with statutory approach and conceptual approach.

Keywords: *integration principle, bankruptcy, codification, unification.*

PENDAHULUAN

Hukum perdata formil (acara perdata) berfungsi untuk melaksanakan hukum perdata materiil. Oleh karenanya hukum acara perdata sangat penting agar hukum perdata materiil dapat dilaksanakan dengan baik. Jika hukum materiil telah dilanggar yang menyebabkan kerugian pada pihak yang lainnya, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan hak baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa kepada lembaga yang berwenang yaitu pengadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap hukum perdata materiil diperlukan kehadiran hukum perdata formil atau hukum acara perdata untuk menjalankan dan menegakkan hukum perdata materiil.

Hukum Acara Perdata sampai saat ini belum diatur di dalam satu kitab undang-undang tersendiri (kodifikasi) sebagai hukum acara perdata nasional, melainkan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang berupa peninggalan jaman Pemerintahan Kolonial Belanda maupun yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan produk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam peraturan perundang-undangan tertentu seperti diantaranya UU Kepailitan dan PKPU ada kecenderungan dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum perdata materiil juga mengatur hukum perdata formil. Sehingga hukum acara perdata menjadi sangat parsial. Sungguh sangat menyedihkan keadaan hukum acara perdata kita setelah 72 (tujuh puluh dua) tahun Negara Indonesia ini merdeka belum dapat mewujudkan kodifikasi dan unifikasi hukum acara perdata.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (disingkat UU Kepailitan dan PKPU) ada diatur bahwa UU Kepailitan dan PKPU menganut asas integrasi. Dimaksudkan adalah sistem hukum formil dan sistem hukum materiil merupakan suatu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Hal ini mengandung arti bahwa dalam hukum perdata materiil sekaligus didalamnya juga terdapat ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan hukum perdata formil

sebagai suatu kesatuan dalam hukum perdata nasional. Asas integrasi ini ditegaskan kembali di dalam Pasal 299 UU Kepailitan dan PKPU yang menentukan: “Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata.” Secara akontrario pasal ini mengandung arti bahwa hukum acara yang berlaku dalam penyelesaian permohonan pernyataan pailit adalah hukum acara yang ditentukan dalam UU Kepailitan dan PKPU, selajutnya jika tidak diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU, maka yang berlaku adalah hukum acara perdata pada umumnya. Bahwa di satu sisi hukum acara yang berlaku adalah apa yang tentukan dalam UU Kepailitan dan PKPU sebagai ketentuan khusus (*lex specialist*) dan jika tidak diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU, maka yang berlaku adalah hukum acara perdata sebagai aturan yang bersifat umum. (*lex generalis*).

Permasalahannya adalah, apakah dengan diaturnya hukum acara kepailitan dalam UU Kepailitan yang menyatu dengan sistem hukum materiil tersebut sesuai ataukah bertentangan dengan cita-cita kodifikasi dan unifikasi hukum acara perdata ?

Artikel ini disusun berdasarkan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal.¹ Dengan uraian yang dituangkan secara deskriptif analitis, dari sumber bahan hukum primer, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan PKPU, sekunder; berupa artikel dna litratur yang berkenaan dengan kepailitan dan hukum acara perdata, dan tersieer berupa kamus hukum. Menurut Zainuddin Ali, peneliti hukum normatif mencakup: Penelitian terhadap asas-asas hukum; Penelitian terhadap sistematika hukum; Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum; Penelitian sejarah hukum dan Penelitian perbandingan hukum². Penelitian ini bertujuan untuk melihat sinkronisasi antara hukum acara yang diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU dengan hukum acara perdata sebagai hukum acara yang berlaku umum “*lex generalist*”, sinkronisasi antara asas integrasi dengan cita-cita kodifikasi dan unifikasi hukum acara perdata. Artikel ini mengedepankan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dan pendekatan konsep hukum (*the concept approach*).

Sebagai keaslian artikel ini, ada beberapa penelitian tetang kepailitan, namun berbeda dengan artikel penulis, penelitian dimaksud adalah: Disertasi dengan judul “Formulasi Kebijakan Hukum Pemulihan Fungsi Lembaga Kepailitan Sebagai Lembaga Penyelesaian Kewajiban Debitur” oleh Marwanto, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana; Penelitian Dosertasi yang sudah menjadi buku dengan judul “ Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan” oleh M Hadi Shubhan, Program Doktor

1 Menurut Made Pasek Diantha, istilah penelitian normatif dan penelitian doktrinal, yang lebih tepat adalah penelitian hukum normatif, karena dengan istilah normatif menggambarkan bahwa penelitian kita adalah mengenai norma yang pernah, sedang dan yang akan berlaku., I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 92.

2 H Zainuddin Ali, 2013, *Metoda Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, h. 22.

Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. Artikel penulis bberbeda jauh dengan kedua penelitian tersebut diatas.

PEMBAHASAN

Kodifikasi dan Unifikasi Hukum Acara Perdata Sebagai Cita-Cita.

Istilah kodifikasi berasal dari kata *codificatie* (Belanda) *codification* (Inggris), yang berarti penyusunan hukum atau perundang-undangan dalam buku. Dalam Black Law Dictionary, disebutkan: “*codification - the process of compiling, arranging, and systematizing the laws of a given jurisdiction, or of a discrete branch of the law into an ordered code*”³. Di dalam kamus hukum disebutkan bahwa kodifikasi adalah penyatuan sejumlah peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam sebuah buku hukum atau buku perundang-undangan; pengumpulan ketentuan-ketentuan hukum dalam sebuah kitab secara sistimatik dan teratur.⁴

Berarti kodifikasi mengandung arti penyusunan undang-undang atau hukum tertentu terhadap materi hukum yang sama yang menjadi suatu kitab undang-undang atau kitab hukum tertentu yang tersusun secara lengkap dan sistimatis. Kodifikasi muncul pertama kali bertujuan untuk membatasi kekuasaan hakim dalam memutus suatu perkara pada awal abad ke-20 di Perancis yaitu *code civil* dan *code penal*.

Unifikasi hukum adalah suatu usaha atau suatu langkah penyeragaman suatu hukum atau undang-undang tertentu untuk diberlakukan terhadap seluruh masyarakat di wilayah negara tertentu sebagai hukum nasional. Sehingga usaha kodifikasi hukum tidak dapat dilepaskan dengan usaha unifikasi hukum.

Upaya pemerintah Indonesia untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi hukum menurut S.M Amin⁵, sudah dilakukan segera setelah pengakuan kemerdekaan negara kita, pemerintah Republik Indonesia mencurahkan perhatian atas keserbaragaman hukum yang masih berlaku dan insaf betapa pentingnya kesatuan hukum bagi kesatuan bangsa. Pemerintah mulai menjalankan usaha-usaha bagi penciptaan suatu hukum nasional yang berlaku bagi bangsa Indonesia, tanpa kecuali, berarti termasuk hukum acara perdata. Upaya pemerintah mengenai kodifikasi dan unifikasi hukum, sudah dimulai tahun 1950 dengan Panitia Penyelidik Peraturan

³ Bryan A Garner, 2004, *Black's Law Dictionaty*, Ninth Edition, West A Thomson Reuters Businees, Inites States of America, P. 294.

⁴ M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, cetakan I, Reality Publisher, Surabaya, h. 368.

⁵ S.M Amin, 1978, *Kodifikasi dan Unifikasi Hukum Nasional*, Cetakan Pertama, P.T. Sastra Udaya, Jakarta, h. 56.

Hukum Perkawinan.⁶ Upaya pemerintah ini mengalami perjalanan panjang selama 24 tahun, akhirnya tahun 1974 baru terwujud kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Mochtar Kusumaatmadja,⁷ bidang hukum keluarga hukum perkawinan, dan hukum waris termasuk bidang hukum yang sulit diperbaharui (baca kodifikasi dan unifikasi), karena bidang hukum ini sangat erat hubungannya dengan sepiritual dan budaya. Pantaslah UU Nomor Tahun 1974 sampai saat ini tidak dapat dilaksanakan dengan efektif. Berbeda halnya dengan kodifikasi dan unifikasi hukum yang netral seperti hukum acara perdata, seyogyanya mendapat prioritas karena tidak terkait dengan agama, adat dan budaya.

Secara filosofis kodifikasi dan unifikasi hukum termasuk kodifikasi dalam bidang hukum acara perdata merupakan cita-cita luhur pembangunan hukum nasional serta untuk kepentingan bangsa dan negara, karena unifikasi dan kodifikasi memberikan manfaat baik bagi penegak hukum maupun bagi seluruh masyarakat terutama para pencari keadilan. Cita-cita besar unifikasi dan kodifikasi hukum acara perdata telah lama dicita-citakan. Tahun 1967 tepatnya tanggal 12 Juni 1967, pada sidang pleno BP-LPHN ke-13 telah disahkan RUU Hukum Acara Perdata Dalam Lingkungan Peradilan Umum,⁸ namun sampai saat ini belum menjadi undang-undang. Selanjutnya tahun 2011 juga telah tersusun Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Hukum Acara Perdata (disingkat RUU HAP) yang diketuai oleh Dr. J. Djohansyah, SH., MH⁹, RUU Hukum Acara Perdata telah masuk program legislasi nasional (prolegnas 2015-2019) namun sampai saat ini RUU HAP juga belum menjadi undang-undang.

Asas Integrasi Dalam UU Kepailitan dan PKPU

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang Undang kepailitan dan PKPU. Marwanto mengatakan bahwa filosofi tujuan kepailitan adalah untuk melakukan pendistribusian aset debitor secara proporsional kepada para kreditornya.¹⁰ Agar debitor dapat dinyatakan sebagai debitor pailit, harus dinyatakan dengan putusan pengadilan, dengan cara mengajukan permohonan pernyataan pailit. Permohonan pernyataan pailit diperlukan hukum acara tersendiri sebagai kekhususan

⁶ *Ibid.*

⁷ Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, cetakan kedua, Alumni, Bandung, h. 24-24.

⁸ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1980, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, h. 14.

⁹ http://www.bphn.go.id/data/documents/na_ru_tentang_hukum_acara_perdata_small_claims_court.pdf, diunduh pada tanggal 17 Juni 2017.

¹⁰ Marwanto, 2016, *Formulasi Kebijakan Hukum Pemulihan Fungsi Lembaga Kepailitan Sebagai Lembaga Penyelesaian Kewajiban Debitor*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h. 120.

(*lex specialis*) dari hukum acara perdata yang berlaku. Diundangkannya UU Kepailitan dan PKPU, adalah merupakan perwujudan pembangunan hukum nasional untuk mendukung adanya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan penegakan hukum seiring dengan semakin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan yang menyebabkan semakin banyak permasalahan dalam bidang utang piutang. Pembangunan hukum yang berkenaan dengan penegakan hukum haruslah termasuk pembangunan bidang hukum acara atau hukum formil. Subekti dalam Taufik Makarao, mengatakan bahwa hukum acara itu mengabdikan pada hukum materiil, maka dengan sendirinya setiap perkembangan dalam hukum materiil sebaiknya selalu diikuti dengan penyesuaian hukum acaranya.¹¹ Dalam bidang kepailitan, perkembangan hukum materiil berbarengan dengan hukum formil dan diatur menjadi satu atau terintegrasi dalam UU Kepailitan dan PKPU.

Hukum acara dalam permohonan pernyataan pailit atau dalam hal penyelesaian perkara pailit, disamping berlaku hukum acara perdata sebagai hukum perdata formil juga berlaku hukum acara perdata secara khusus yang diatur di dalam ketentuan-ketentuan UU Kepailitan dan PKPU. Bambang Sugeng mengatakan bahwa hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan negeri adalah merupakan ketentuan umum dari beberapa hukum acara untuk pengadilan-pengadilan lain yang memiliki karakter yang sama dengan Hukum Acara Perdata¹².

Pasal 299 UU Kepailitan dan PKPU sebenarnya merupakan hukum perdata materiil, namun di dalamnya juga terdapat hukum perdata formil, sebagai hukum acara sebagai *lex specialis* dari ketentuan-ketentuan umum hukum acara perdata sebagai *lex generalis*-nya. Menyatunya antara hukum perdata formil dan hukum perdata materiil dalam suatu undang-undang yang bersifat nasional, dikarenakan UU Kepailitan dan PKPU menganut asas integrasi, disamping asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha dan asas keadilan sebagaimana dapat dilihat dalam penjelasan umum UU Kepailitan dan PKPU.¹³

Asas integrasi dimaksudkan dalam undang-undang Kepailitan dan PKPU, bahwa sistem hukum formil dan sistem hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Sebagai ketentuan sistem hukum

¹¹ Taufik Makarao, Moh. 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cetakan Pertama, PT Rineka Cipta, Jakarta h.5.

¹² Bambang Sugeng, dan Sujayadi, 2011, *Hukum Acara Perdata & Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, cetakan ke-1, Jakarta h.15.

¹³ Asas keseimbangan mengandung arti bahwa ketentuan-ketentuan dalam UU Kepailitan dan PKPU dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, dilain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik. Asas kelangsungan usaha dimaksudkan dimana ketentuan-ketentuan dalam UU Kepailitan dan PKPU memberikan kemungkinan suatu perusahaan debitur yang prospektif tetap berlangsung usahanya. Asas keadilan mengandung arti bahwa ketentuan dalam UU Kepailitan dan PKPU dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak.

formil yang bersifat *lex specialis* menyatu dengan sistem hukum perdata materiil dalam UU kepailitan dan PKPU.

Dalam hubungannya dengan empat asas yang terdapat dalam penjelasan umum UU Kepailitan dan PKPU sebagaimana tersebut diatas, didalam penjelasan umum juga disebutkan bahwa UU Kepailitan dan PKPU adalah merupakan produk hukum nasional yang menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum, penegakan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran yang diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan perekonomian nasional, salah satu yang diperlukan adalah undang-undang tentang kepailitan termasuk penundaan pembayaran utang. Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan bahwa tuntutan dunia bisnis industrial yang menyebabkan perubahan-perubahan di dunia hukum (yang merefleksikan perubahan struktural dari dunia normatif *from status to contracts*) ataukah sebaliknya perubahan-perubahan dalam institusi hukum itulah yang memungkinkan maraknya dunia bisnis.¹⁴ Dengan demikian perkembangan bisnis harus segera diikuti oleh perkembangan hukum nasional, termasuk dalam bidang hukum bisnis, atau yang lebih khusus termasuk hukum kepailitan.

Kewenangan Lembaga Peradilan Dalam Memeriksa dan Memutus Permohonan Pernyataan Pailit

Kewenangan mengadili (kompetensi) dari suatu lembaga peradilan harus diketahui sejak awal dalam bidang penyelesaian sengketa melalui litigasi termasuk didalamnya penyelesaian sengketa dalam bidang kepailitan, khususnya pengajuan permohonan pernyataan pailit. Tanpa mengetahui kompetensi lembaga peradilan, tidak dapat diketahui kemana permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan.

Dalam hukum acara termasuk hukum acara perdata, terdapat dua kompetensi atau kewenangan mengadili, yaitu kompetensi absolut (kewenangan mutlak) dan kompetensi relatif (kewenangan nisbi). Kompetensi absolut adalah merupakan kewenangan lembaga peradilan untuk menangani, memeriksa dan memutus suatu perkara tertentu yang tidak bisa digantikan oleh lembaga peradilan yang lainnya, baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun dalam lingkungan peradilan yang berbeda (*atributie van rechtsmacht*). Kompetensi relatif adalah kewenangan lembaga peradilan untuk memeriksa mengadili dan memutus suatu perkara sebagai peradilan yang sejenis dalam lingkungan peradilan yang sama (*distributie van rechtsmacht*). Selain pengadilan yang berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman

¹⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, MuMa, Cetakan Pertama, Jakarta, h. 293.

yang digariskan melalui amandemen Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terdapat juga sistem penyelesaian sengketa berdasarkan yurisdiksi khusus yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ini merupakan kewenangan absolut *ekstra judicial*¹⁵ berdasarkan yurisdiksi khusus oleh undang-undang.

Dilihat dari segi kewenangan absolut, permohonan pernyataan pailit sebagai salah satu penyelesaian sengketa bisnis melalui litigasi adalah merupakan kewenangan absolut *ekstra judicial* yaitu kewenangan pengadilan niaga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 7 UU Kepailitan dan PKPU.

Pengadilan niaga adalah merupakan pengadilan khusus¹⁶ dalam lingkungan peradilan umum. Sebagai pengadilan khusus termasuk kompetensi absolut yang berkenaan dengan upaya hukum putusan atas suatu permohonan pailit pada pengadilan niaga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 UU Kepailitan dan PKPU adalah kasasi pada Mahkamah Agung bukan banding ke pengadilan tinggi. Kompetensi absolut pengadilan niaga, sesuai dengan ketentuan Pasal 300 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU di samping mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara kepailitan dan PKPU, juga mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perkara lain dalam bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.

Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kompetensi pengadilan niaga disamping memiliki kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perkara kepailitan dan PKPU, juga mempunyai kompetensi absolut untuk memeriksa mengadili dan memutus perkara-perkara yang berkenaan dengan hak kekayaan intelektual HAKI diantaranya:¹⁷

1. desain industri berdasarkan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000;
2. perkara desain tata letak sirkuit terpadu berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001;
3. perkara-perkara tentang merek dan indikasi geografis berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016;
4. perkara-perkara hak cipta berdasarkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002;

¹⁵ Sophar Maru Hutagalung, 2012, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Perdata*, sinar Grafika cetakan pertama, Jakarta, h.33.

¹⁶ Pasal 1 angka 8 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan; Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

¹⁷ Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, et.al, 2016, *Buku Ajar, Penyelesaian Sengketa Bisnis*, cetakan pertama, Pustaka Ekspresi, Tabanan, h.103.

5. perkara-perkara likuidasi bank dan lembaga penjamin simpanan berdasarkan Undang Undang Nomor 24 tahun 2004.

Berbicara masalah kewenangan relatif sebagaimana telah di kemukakan diatas adalah kewenangan dari lembaga peradilan yang sejenis dalam lingkungan peradilan yang sama, maka perlu dikemukakan disini bahwa pengadilan niaga adalah pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum. Namun sampai saat ini tidak setiap lingkungan peradilan umum didalamnya ada pengadilan niaga. Sampai saat ini di seluruh Indonesia baru ada 5 pengadilan niaga yaitu:¹⁸

1. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, meliputi wilayah Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung dan Provinsi Kalimantan Barat;
2. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, provinsi Maluku dan Provinsi Irian Jaya;
3. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, meliputi wilayah Provinsi Jawa Timur; Provinsi Kalimantan Selatan; Provinsi Kalimantan Tengah; Provinsi Kalimantan Timur; Provinsi Bali; Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, meliputi wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, meliputi wilayah Provinsi Sumatra Utara, Provinsi Riau; Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Bengkulu; Provinsi Jambi, dan Daerah Istimewa Aceh.

Terhadap penyelesaian sengketa bisnis dalam bidang kepailitan, permohonan pailit diajukan pada pengadilan niaga dimana debitor berkedudukan, dalam arti kedudukan hukum dari debitor.¹⁹ Hal ini senada dengan asas hukum acara pada umumnya yaitu asas *actor*

¹⁸ *Ibid.* h. 105

¹⁹ Pasal 3 UU Kepailitan dan PKPU menentukan:

- (1) Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor;
- (2) Dalam hal debitor telah meninggalkan wilayah negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang untuk menjatuhkan putusan terdapat permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan yang di daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan terakhir debitor;
- (3) Dalam hal debitor adalah suatu pesero suatu firma, Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan firma tersebut juga berwenang memutuskan;
- (4) Dalam hal debitor tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia, akan tetapi menjalankan profesi atau usahanya di dalam wilayah negara republik indonesia, Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia;
- (5) Dalam hal debitor merupakan bandan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.

sequitur ferum rei, yang artinya gugatan diajukan pada pengadilan di wilayah hukum dimana tergugat bertempat tinggal.

Sifat dari hukum acara perdata yang merupakan hukum formil yaitu hukum mengenai aturan main dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan mengikat bagi semua pihak serta tidak bisa disimpangi, sehingga hukum acara perdata mempunyai sifat publik. Oleh karena itu untuk mencapai kepastian hukum, hukum acara haruslah berbentuk kodifikasi dan unifikasi, sehingga dengan demikian dapat berlaku umum dan mengikat semua pihak.²⁰

Hukum Acara Perdata sampai pada saat ini sebagian terbesar belum diatur dalam bentuk Undang Undang yang bersifat nasional (unifikasi dan kodifikasi), walaupun tahun 1967 telah terbentuk Rancangan Undang Undang Hukum Acara Perdata, namun sampai saat ini belum menjadi undang-undang. Berkenaan dengan pengertian Hukum Acara Perdata, dikalangan para sarjana masih memberikan pengertian yang berbeda-beda sebagaimana dikemukakan Taufik Makarao sebagai berikut:²¹

Menurut Wiryono Projodikoro, sebagai mantan Ketua Mahkamah Agung menyatakan bahwa Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lainnya untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata. M.H. Tirtaamidjaja mengemukakan bahwa hukum acara perdata adalah suatu akibat yang timbul dari hukum perdata materiil. Sudikno Mertokusumo (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada) mengatakan bahwa Hukum Acara Perdata adalah aturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim, atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.²²Selanjutnya dikatakan bahwa secara lebih konkret bahwa hukum acara perdata adalah bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari pada putusannya. Tuntutan dalam hal ini adalah tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrechting* atau menghakimi sendiri.

Hukum Acara Perdata masih tersebar dalam berbagai peraturan perundangan yang pada pokoknya diatur dalam HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*)/R.Bg. (*Reglement Buitengewesten*); juga dalam beberapa hal berlaku Rv. (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) juga Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sebagai terjemahan dari BW

²⁰ Efa Laela Fakhriah, 2016, *Perbandingan HIR dan RBG*, CV. Keni Media, cetakan ke-2, Bandung, h.3.

²¹ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cetakan Pertama, 2004, PT Rineka Cipta, Jakarta, h. 5.

²² Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan pertama Edisi ketiga, Liberty, Yogyakarta, h. 2.

(*Burgelijke Wetboek*); Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Peradilan Umum, Undang Undang Mahkamah Agung dan sebagainya.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 299 UU Kepailitan dan PKPU, bahwa hukum acara yang berlaku dalam permohonan pernyataan pailit disamping sebagaimana telah ditentukan sebagai satu kesatuan didalam UU Kepailitan dan PKPU, juga berlaku hukum acara perdata jika belum diatur didalam UU dimaksud. Sebagai ketentuan-ketentuan khusus, ketentuan dalam UU Kepailitan dan PKPU berbeda dengan ketentuan-ketentuan hukum acara perdata pada umumnya.

Di bawah ini selanjutnya akan diuraikan mengenai kekhususan dalam bidang permohonan pernyataan pailit mengenai kompetensi dari lembaga peradilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pernyataan pailit serta beberapa kekhususan dalam hal proses pengajuan permohonan pernyataan pailit.

Kekhususan Hukum Acara Kepailitan Dalam Bidang Kompetensi Lembaga Peradilan

Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa kompetensi atau kewenangan lembaga peradilan dalam memeriksa mengadili dan memutus perkara ada dua yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut adalah kewenangan lembaga peradilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang secara mutlak tidak dapat digantikan oleh lembaga peradilan yang lain baik dalam lingkungan peradilan yang berbeda maupun lingkungan peradilan yang sama. Sesuai Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, ada empat lingkungan peradilan, yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Pengajuan permohonan pailit sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 7 UU Kepailitan dan PKPU, bahwa permohonan pernyataan pailit diajukan pada pengadilan niaga.²³ Kewenangan absolut pengadilan niaga bukan saja memeriksa mengadili dan memutus perkara-perkara kepailitan melainkan juga mengenai perkara-perkara lain yang ditentukan di dalam Undang Undang, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 300 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menentukan Pengadilan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang Undang ini selain memeriksa dan memutus permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Undang Undang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengadilan niaga adalah

²³ Pasal 2 ayat (1) menentukan: Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Sedangkan Pasal 1 angka 7 menentukan: Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan Peradilan Umum.

pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa mengadili dan memutus perkara kepailitan dan PKPU serta sengketa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengadilan niaga adalah merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan; yang dimaksud dengan pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yang diatur dengan Undang Undang.

Dari ketentuan tersebut yang menjadi unsur-unsur pengadilan khusus adalah:

1. Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu; (hanya perkara tertentu);
2. Dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung;
3. Pembentukannya diatur dengan undang-undang;

Pengadilan niaga sebagai salah satu pengadilan khusus pertama kali di bentuk di Indonesia pada tahun 1998 berdasarkan Pasal 281 Perpu Nomor 1 tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi Undang Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Pengadilan niaga dimaksud berkedudukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selanjutnya berdasarkan Pasal 306 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sebagai pengganti Undang Undang Nomor 4 Tahun 1998 Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang telah dibentuk berdasarkan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 dan Undang-Undang No 4 Tahun 1998, dinyatakan tetap berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang menjadi lingkup tugas pengadilan niaga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 306. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 37 tahun 1999, dibentuk lagi 4 pengadilan niaga dengan daerah hukumnya masing yaitu Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar; Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya; Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan.

Berkenaan dengan syarat pengadilan niaga sebagai pengadilan khusus dibentuk berdasarkan Undang Undang sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 1 angka 8 Undang Undang Nomor 48 tahun 2009, ternyata dalam prakteknya Pengadilan Niaga yang pertama yaitu Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibentuk berdasarkan Perpu, yaitu Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi Undang Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang dipertegas kembali dengan Pasal 306 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004. Namun pembentukan

Pengadilan Niaga yang lainnya yaitu Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan ternyata dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden yaitu Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999, dan bukan dengan undang-undang. Dilihat dari pembentukannya maka pembentukan pengadilan niaga selain pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah tidak sesuai dengan Pasal 1 angka 8 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009. Jika merujuk pada Pasal 300 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU yang menentukan bahwa pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan keputusan presiden, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan. Berarti terjadi insinkronisasi dalam UU Kepailitan dan PKPU dengan Undang Undang Kehakiman dalam pembentukan pengadilan niaga, yaitu disatu pihak Undang Undang Kehakiman memerintahkan pembentukan pengadilan khusus dengan undang-undang, sedangkan UU Kepailitan dan PKPU memerintahkan pembentukan pengadilan niaga dengan Keputusan Presiden.

Hukum Acara Dalam UU Kepailitan dan PKPU sesuai Asas Integrasi

Sesuai asas intergrasi yang dianut dalam UU Kepailitan dan PKPU, maka didalam UU yang sebenarnya mengatur tentang hukum perdata materiil, didalamnya juga mengatur tetang hukum acara perdata. Pasal 299 UU Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa; kecuali ditentukan lain, dalam Undang Undang ini, maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata. Secara *acontrario* bahwa hukum acara yang berlaku untuk permohonan pailit adalah hukum acara yang ditentukan secara khusus didalam UU ini dan jika ada yang tidak diatur dalam UU ini baru berlaku hukum acara perdata pada umumnya.

Kekhususan dari penyelesaian perkara melalui pengadilan niaga sebagai tindak lanjut dari asas integrasi, diantaranya sebagai berikut:

1. Mediasi Tidak Wajib

Untuk sengketa atau perkara kepailitan dan penundaan pembayaran utang tidak diwajibkan atau dikecualikan dari kewajiban menempuh mediasi (Pasal 4 ayat (2) UU Kepeilitan dan PKPU). Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016, menentukan; semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) terdapat putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Mahkamah Agung ini. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan niaga termasuk kedalam salah satu yang dikecualikan dari kewajiban menempuh prosedur mediasi (Pasal 4 ayat (2) huruf a angka

1). Namun atas kesepakatan para pihak, penyelesaian sengketa melalui pengadilan niaga yang dikecuali dari kewajiban mediasi, tetap dapat menenpuh mediasi sukarela baik pada tingkat pemeriksaan persidangan maupun pada tingkat upaya hukum. Apa yang dimaksud dengan mediasi sukarela tidak ada diatur lebih lanjut. Ketentuan ini bermakna bahwa walaupun para pihak tidak diwajibkan, namun peluang untuk menempuh jalur perdamaian tetap terbuka sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Khusus untuk kepailitan, perdamaian diatur didalam Pasal 265 s/d Pasal 294 UU Kepailitan dan PKPU.

2. Wajib Menggunakan Advokat

Sesuai UU kepailitan dan PKPU, menggunakan advokat diwajibkan dalam mengajukan permohonan pailit, kecuali permohonan diajukan oleh Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Menteri Keuangan. Demikian dalam ditentukan dalam Pasal 7 dan demikian pula Pasal 294 UU Kepailitan dan PKPU.²⁴

Permohonan kepailitan diajukan ke pengadilan niaga melalui panitra pengadilan niaga dan yang dapat mengajukan permohonan kepailitan adalah:²⁵ Debitor, Kreditor²⁶, Kejaksaan,²⁷ dalam hal untuk kepentingan umum; Bank Indonesia dalam hal kreditornya merupakan bank; Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), dalam hal debitornya perusahaan efek, atau lembaga kliring, dan penjaminan; dan Menteri Keuangan dalam hal debitornya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berkecimpung dalam bidang kepentingan publik.

3. Beracara Dengan Surat

Sesuai UU Kepailitan dan PKPU, beracara pada pengadilan niaga selalu beracara dengan surat (*schiftelijke procedure*), berlainan dengan beracara pada peradilan umum (PN) beracara dapat dilakukan secara lisan dan juga dapat dilakukan dengan tulisan atau surat (*modelinge procedure*)²⁸

²⁴ Pasal 294 mmenentukan; Permohonan yang diajukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237; Pasal 255; Pasal 256; Pasal 259; Pasal 283; Pasal 285; Pasal 290 dan Pasal 291 harus ditandatangani oleh advokat yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus, kecuali apabila diajukan oleh pengurus.

²⁵ M. Hadi Shubhan, 2012, *Hukum Kapailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan*, Cetakan ke-3, Kencana Predana Media Group, Jakarta, h. 119. Perhatikan pula Ketentuan Pasal 2 UU Kepailitan dan PKPU.

²⁶ Dalam dunia kepailitan kreditor dpat dibedakan menjadi tiga, yaitu pertama kreditor sparatis yaitu kreditor yang memegang jaminan kebendaan (Psl 1134 ayat (2) KUH Pdt).; Kedua kreditor Preferen, yaitu kreditor yang didahulukan karena sifat piutangnya oleh UU (seperti Psl. 1139 KUH Pdt). ; kediga kreditor konkuren yaitu kreditor yang tudak termasuk salah satu kreditor tersebut diatas.

²⁷ Sesuai dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk kepentingan untuk kepentingan umum dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi dan tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pailit. Yang dimaksud dengan “kepentingan umum “ adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas, misalnya a. debitor melarikan diri; b. Debitor mrnggelapkan bagian dari harta kekayaan; c. Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha laian yang menghimpun dana dari masyarakat; d. debitor mempunyai utang yang berasal dari perhimpunan dana dari masyarakat luas; e. debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau dalam hal lainnya menurut kejaksaaan merupakan kepentingan umum.

²⁸ <http://www.gresnews.com/berita/tips/012312-tips-hukum-acara-pengadilan-niaga-dalam-perkara-kepailitan/0/#sthash.H8e97rfe.dpuf>, diakses tanggal 20 April 2017.

4. Waktu Pemeriksaan Terbatas

Pembatasan pemeriksaan perkara juga berlaku untuk peradilan umum. Sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014, pemeriksaan perkara pada peradilan tingkat pertama harus sudah selesai dalam jangka waktu 5 (lima) bulan, dan untuk tingkat banding selama 3 (tiga) bulan. Sedangkan pemeriksaan perkara kepailitan harus sudah dijatuhkan putusan dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak diajukannya permohonan pailit (Pasal 8 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU). Pembatasan waktu untuk perkara kepailitan, sudah dimulai sejak pengajuan permohonan pailit itu masuk ke meja panitera, dimana panitera dalam jangka waktu 2 (dua) hari harus sudah menyampaikan permohonan pailit tersebut kepada ketua pengadilan. Setelah 3 (tiga) setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari dan tanggal sidang, dan sidang sudah harus diselenggarakan paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak permohonan didaftarkan. Demikian ditentukan pada Pasal 6 UU Kepailitan dan PKPU.

5. Pembuktian Sederhana

Kata sederhana memang masih sangat relatif, sebagaimana halnya dengan asas “Tri Logi Peradilan” Pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan jelas diatur pada Pasal 8 ayat (4) yang menentukan permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apa bila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)²⁹ telah terpenuhi.

6. Putusan Bersifat Serta Merta

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (7) UU Kepailitan dan PKPU, Putusan permohonan pernyataan pailit dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*). Hal ini berarti bahwa putusan pengadilan tingkat pertama atas permohonan pailit dapat dilaksanakan walaupun masih ada upaya hukum kasasi ataupun Peninjauan Kembali.

7. Dapat Melakukan Penyimpangan Klausula Arbitrase

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah merupakan kompetensi absolut. Ini berarti setiap perjanjian yang telah menentukan klausula arbitrase menghapuskan kewenangan pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.³⁰ Berbeda dengan penyelesaian sengketa atau permohonan pernyataan pailit pengadilan niaga tetap berwenang untuk menanganinya.

²⁹ Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menentukan: Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor, dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri atau atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

³⁰ Susanti Adi Nugroho, 2015, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Kencana, cetakan ke-1, Jakarta, h. 103.

Dalam suatu perjanjian yang memuat klausula arbitrase, tidak menghilangkan kompetensi/kewenangan absolut dari pengadilan niaga untuk menangani permohonan pertanyaan pailit. Pasal 303 UU Kepailitan dan PKPU menentukan: Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasak 2 ayat (1) undang undang ini. Dalam hal ini sepertinya telah terjadi konflik norma antara UU No.30 Tahun 1999 dengan UU Kepailitan dan PKPU.

8. Tidak Tersedia Hukum Banding

Dalam hukum acara perdata, upaya hukum terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, tersedia upaya hukum biasa yang disebut dengan upaya hukum banding. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan niaga sebagai pengadilan khusus termasuk permohonan pernyataan pailit tidak tersedia upaya hukum banding, melainkan hanya tersedia upaya hukum kasasi sebagai upaya hukum biasa dan peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa.

Dengan adanya 8 (delapan) kekhususan dari permohonan pernyataan pailit/penyelesaian sengketa kepailitan, baik mengenai proses beracara maupun mengenai lembaga peradilan yang berwenang, yaitu pengadilan niaga sebagai pengadilan khusus, maka hukum acara yang berlaku tidak seluruhnya hukum acara perdata yang berlaku pada umumnya (HIR/RBg), karena HIR/RBg tidak ada mengatur kekhususan dimaksud. Maka UU Kapailitan dan PKPU menganut asas integrasi, yang pada intinya di dalam sistem hukum perdata materiil juga terdapat sistem hukum formil, atau sistem hukum formil menyatu di dalam sietm hukum materiil.

Dengan dianutnya asas integrasi dalam UU Kepailitan dan PKPU, disatu sisi memang memberikan kelancaran proses pengajuan permohonan atau penyelesaian sengketa kepailitan, karena sampai saat ini kita belum memiliki hukum acara perdata nasional yang di kodifikasi dalam arti menjadi satu buku Hukum Acara Perdata yang berlaku secara nasioanl (unifikasi). Disamping itu, dalam setiap perkembangan hukum perdata materiil seharusnya juga diikuti dengan perkembangan hukum perdata formil yang sesuai dengan fungsinya bahwa hukum formil adalah sebagai hukum yang bertujuan untuk dapat dilaksanakannya hukum perdata materiil atau sebagai hukum yang berfungsi untuk menjamin tetap tegalnya hukum perdata materiil. Namun disisi lain, hukum acara perdata yang sekarang memang masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan menjadi semakin banyak yang tersebar, parsial duluar kondifikasi. Salah satu penyebabnya adalah dengan dianutnya asas integrasi dalam sistem hukum perdata fomil dan materiil di Indonesia.

Diketahui bersama bahwa sifat, dan fungsi hukum perdata formil berbeda dengan sifat dan fungsi hukum perdata materiil. Efa Laela Fakhriah, mengemukakan sifat hukum acara perdata adalah sebagai aturan main yang mempunyai sifat hukum publik,³¹ sehingga seyogyanya hukum perdata formil tidak digabungkan dengan hukum perdata materiil, karena tidak sesuai dengan tujuan kodifikasi dan unifikasi hukum. Asas integrasi yang dianut dalam UU Kepailitan dan PKPU, dilihat dari kodifikasi dan unifikasi hukum acara perdata, dapat dikatakan sementara sebelum adanya Kitab Undang Undang Hukum Acara yang bersifat nasional. Namun demikian hal ini juga tergantung dari pembentuk undang-undang apakah asas integrasi akan tetap dipertahankan terhadap perkara-perkara perdata (kepailitan) yang diperiksa oleh Pengadilan Khusus (niaga).

PENUTUP

Upaya pemerintah Indonesia untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi hukum sudah dilakukan segera setelah pengakuan kemerdekaan negara kita, pemerintah Republik Indonesia mencurahkan perhatian atas keserbaragaman hukum yang masih berlaku dan insaf betapa pentingnya kesatuan hukum bagi kesatuan bangsa. Pemerintah mulai menjalankan usaha-usaha bagi penciptaan suatu hukum nasional yang berlaku bagi bangsa Indonesia, tanpa kecuali, berarti termasuk hukum acara perdata. Upaya pemerintah mengenai kodifikasi dan unifikasi hukum, sudah dimulai tahun 1950 dengan Panitia Penyelidik Peraturan Hukum Perkawinan.

Diundangkannya UU Kepailitan dan PKPU, adalah merupakan perwujudan pembangunan hukum nasional untuk mendukung adanya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan penegakan hukum seiring dengan semakin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan yang menyebabkan semakin banyak permasalahan dalam bidang utang piutang.

Pembangunan hukum yang berkenaan dengan penegakan hukum haruslah termasuk pembangunan bidang hukum acara atau hukum formil, karena sesuai dengan fungsinya hukum acara itu mengabdikan pada hukum materiil, maka dengan sendirinya setiap perkembangan dalam hukum materiil sebaiknya selalu diikuti dengan penyesuaian hukum acaranya. Dalam bidang kepailitan, perkembangan hukum materiil berbarengan dengan hukum formil dan diatur menjadi satu atau terintegrasi dalam UU Kepailitan dan PKPU, karena UU ini menganut asas integrasi disamping asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha dan asas keadilan sebagaimana dapat dilihat dalam penjelasan umum.

³¹ Efa Laela Fakhriah, *Loc. Cit.*

Asas integrasi dimaksudkan dalam undang-undang Kepailitan dan PKPU, bahwa sistem hukum formil dan sistem hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Sebagai ketentuan sistem hukum formil yang bersifat *lex specialis* menyatu dengan sistem hukum perdata materiil dalam UU kepailitan dan PKPU. Dengan dianutnya asas interasi, hukum acara perdata semakin tersebar bahkan parsial, dalam peraturan perundang-undangan.

Jika asas integrasi yang dianut dalam UU Kepailitan dan PKPU di sandingkan dengan cita-cita dan pembangunan hukum acara perdata di Indonesia, jelas asas integrasi bertentangan dengan cita-cita kodifikasi dan unifikasi hukum acara perdata nasional. Namun jika asas integrasi tidak dianut, berarti menghambat perkembangan penegakan hukum perdata materiil, karena hukum acara perdata yang sedang beraku belum mengatur. Sehingga asas integrasi seharusnya mendapat perhatian serius dalam pembangunan hukum khususnya dalam rancangan hukum acara perdata, sehingga menjadi sejalan dengan cita-cita kodifikasi dan unifikasi.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Adi Nugroho, Susanti, 2015, *Penyelesaian Sengkerta Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Kencana, cetakan ke-1, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2013, *Metoda Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amin, S.M., 1978, *Kodifikasi dan Unifikasi Hukum Nasional*, Cetakan Pertama, P.T. Sastra Udaya, Jakarta.
- Hadi Shubhan, M. 2012, *Hukum Kapailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan*, Cetakan ke-3, Kencana Predana Media Group, Jakarta.
- Hutagalung, Sophar Maru, 2012, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Perdata*, sinar Grafikacetakan pertama, Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2006, *Konsem-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, cetakan kedua, Alumni, Bandung.
- Laela Fakhriah, Efa, 2016, *Perbandingan HIR dan RBG*, CV. Keni Media, cetakan ke-2, Bandung.
- Makarao, Taufik, Moh. 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cetakan Pertama, PT Rineka Cipta, Jakarta.

- Marwanto, 2016, *Formulasi Kebijakan Hukum Pemulihan Fungsi Lembaga Kepailitan Sebagai Lembaga Penyelesaian Kewajiban Debitor*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Marwan, M. dan Jimmy P, 2009, Kamus Hukum, cetakan I, Reality Publisher, Surabaya.
- Mertokusumo, Sudikno, 1988, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan pertama Edisi ketiga, Liberty, Yogyakarta.
- Pasek Diantha, I Made, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan ke-1, Kencaan Prenada Media Group, Jakarta.
- Putra, Asmara, Dewa Nyoman, Rai, et.al, 2016, *Buku Ajar, Penyelesaian Sengketa Bisnis*, cetakan pertama, Pustaka Ekspresi, Tabanan
- Sugeng, Bambang, dan Sujayadi, 2011, *Hukum Acara Perdata & Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, cetakan ke-1, Jakarta.
- Sutantio, Retnowulan, dan Oeripkartawinata, Iskandar, 1980, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, *Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, MuMa, Cetakan Pertama, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- HIR (*Het Herziene Indonesisch Relement*) atau Reglement Indonesia Diperbaharui S 1848 No. 16 jo. 1941 No 44, yang berlaku khusus untuk daerah Jawa dan Madura.
- R.Bg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) atau Reglement Daerah Sebrang, S 1927 No 227. RBg ini khusus berlaku untuk darah luar Jawa dan Madura.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Lembaran Negara 2004 Nomor 131; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 157 Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 5076.

Sumber Lain

A Garner, Bryan, 2004, *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, West A Thomson Reuters Business, Inites States of America.

[http://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_hukum_acara_perdata_\(smal_claims_court\).pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_hukum_acara_perdata_(smal_claims_court).pdf)

<http://www.gresnews.com/berita/tips/012312-tips-hukum-acara-pengadilan-niaga-dalam-perkara-kepailitan/0/#sthash.H8e97rfe.dpuf>